



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul	: Daerah Menyesuaikan PTM Terbatas
Tanggal	: Selasa, 08 Februari 2022
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 5

DAMPAK PANDEMI
Daerah Menyesuaikan PTM Terbatas

Jakarta, KOMPAS —

Pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol ketat tetap menjadi pilihan di tengah meningkatnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di banyak daerah. Hal itu dilakukan untuk memulihkan pendidikan yang tertinggal selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan pantauan Kompas, Senin (7/2/2022), terjadi penyesuaian pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tiap hari di sejumlah daerah. Sejak adanya diskresi PTM terbatas untuk PPKM level 2 yang dapat 100 persen menjadi 50 persen sesuai dengan kondisi, sejumlah daerah menurunkan PTM 50 persen, ada yang 25 persen, hingga ada yang pembelajaran jarak jauh (PJJ) penuh.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers secara daring, kemarin, mengutarakan, untuk ilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, serta Bandung Raya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi level 3.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kini ada tiga provinsi yang penambahan kasus harinya melebihi puncak gelombang Delta, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Bali.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti menuturkan, sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang terbaru dan diskresi PTM terbatas di daerah PPKM level 2, PTM terbatas tetap bisa dilaksanakan. Itu dilakukan dengan memperhatikan cakupan vaksinasi guru dan tenaga pendidikan serta vaksinasi kelompok lanjut usia di daerah.

"Kami memahami kondisi perkembangan kasus Covid-19

saat ini yang meningkat. Untuk itu, pilihan PJJ disediakan kembali sehingga orangtua bisa memberi izin untuk PTM atau PJJ. Untuk PJJ 100 persen, hanya di PPKM level 4 dan level 3 yang cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40 persen," tuturnya. Pengaturan PTM terbatas tiap hari sampai kapasitas 100 persen sesuai level PPKM bukan tanpa syarat. Daerah harus memastikan protokol kesehatan dijalankan di tiap sekolah, ada surveilans, percepatan imunisasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta siswa, hingga penghentian PTM jika ada kasus Covid-19 di sekolah hingga maksimal 14 hari.

Situasi di daerah

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, DKI Jakarta mulai menyesuaikan PTM 50 persen dari kapasitas ruang dengan durasi belajar maksimal empat jam pelajaran per hari. "Ini menjadi langkah meminimalkan penularan Covid-9 karena kasus Omicron," ujarnya.

"Kami mengevaluasi PTM dan mengikuti instruksi pemerintah pusat serta Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Sekolah memberikan pilihan kepada orangtua untuk mengizinkan anak ikut PTM terbatas atau PJJ," ujarnya.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Tabrani, kapasitas PTM terbatas dikurangi menjadi 25 persen. Jika ditemukan kasus Covid-19, kegiatan tatap muka di sekolah dihentikan dan beralih kePJJ. "Selama dua pekanwajib PJJ, sambil tes dan lacak untuk mengetahui penyebarannya.

Kalau aman, bisa kembali PTM 25 persen," ucapnya.

Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mulai kemarin PTM menjadi 50 persen. Durasi PTM juga dibatasi maksimal enam jam pelajaran sehari atau disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa.

Suharti menjelaskan, pandemi Covid-19 memengaruhi capaian belajar siswa. Penurunan hasil belajar diantisipasi dengan berbagai program fokus pemulihan pada 2022-2024. Pemulihan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan mutu pendidikan. (ELN/JUM/DAN)